

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan mesra Arab Saudi dan Amerika Serikat telah dijalin oleh kedua pemerintahan sejak era Raja Abdul Aziz Al Saud ditahun 1930 an lalu, dengan ditandai hubungan diplomatik antar kedua negara. Awal hubungan dilomatik keduanya dimulai dengan adanya pengakuan Amerika Serikat terhadap negara Arab Saudi yang waktu itu baru saja memberontak dari Kekhilafahan Otoman dan mendeklarasikan berdirinya Kingdom Saudi of Arabia. Pada tahun 1933 pemerintah Arab Saudi bersama dengan perusahaan Amerika Serikat mendirikan perusahaan minyak pertama di Saudi dengan nama “Aramco”, perusahaan ini kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 1988 lalu.

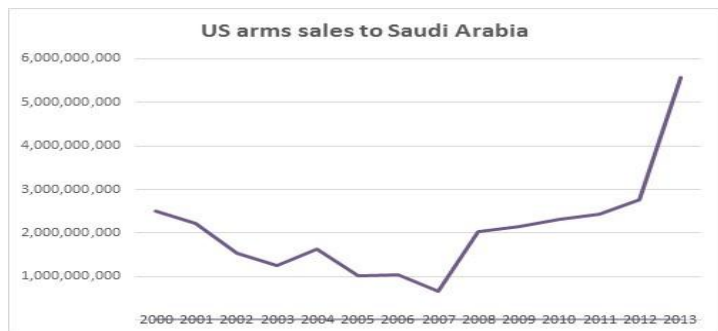
Berlanjut ke era presiden Aamerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, di tahun 1943, presiden Franklin D. Roosevelt mengirimkan misi militer pertama Amerika Serikat ke Arab Saudi, setelah negara adidaya tersebut menyatakan bahwa pertahanan Kerajaan merupakan hal yang vital bagi Amerika Serikat. Di tahun 1945 Presiden Franklin D. Roosevelt bertemu dengan Raja Abdul Aziz Al Saud di Terusan Suez, sebagai tanda diresmikannya hubungan Amerika Serikat-Saudi.

Memasuki era presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower pada tahun 1957, untuk pertama kalinya Gedung Putih mengumumkan awal kemitraan politik antara Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hubungan mesra Saudi-Amerika Serikat kembali lebih di intensifkan oleh Gedung Putih setelah sekutu mereka di Iran rezim Shah digulingkan pemerintahan Syiah Ayatollah Ruhollah Khomeini pada revolusi Iran di tahun 1979.

Setelah berakhirnya perang Iran-Irak pada tahun 1988, dan penurunan ancaman Soviet, hubungan Amerika

Serikat-Saudi harus menghadapi ujian besar setelah adanya invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990. Akan tetapi justru ini meningkatkan hubungan mesra kedua negara setelah pemerintah Amerika Serikat mengirimkan 400 ribu tentaranya ke Arab Saudi di era Presiden George W. Bush untuk membebaskan Kuwait. Sejak saat itu sampai peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat mempertahankan kemitraannya dengan Arab Saudi demi mengamankan aliran minyak yang menjadi tulang punggung politik Amerika (zahid, 2015).

Amerika Serikat telah menjadi pemasok utama untuk sebagian besar kebutuhan militer Saudi, mulai dari jet tempur F-15 hingga sistem komando dan kontrol yang bernilai puluhan miliar dolar. Menurut data dari The Stockholm International Peace Research Institute, dari tahun 2011-2015, Amerika Serikat merupakan pemasok sepertiga dari ekspor senjata global. Penjualan senjata Amerika Serikat ke negara-negara lain mencapai nilai 66,3 miliar dolar, memberikan Amerika pangsa pasar hampir 80 persen.



Gambar 1.1 (Staff, 2015)

Berdasarkan data diatas yang bersumber dari Berita harian Midle East News menunjukkan bahwa pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi mengalami peningkatan secara drastis sejak tahun 2012–2013. Impor senjata Arab Saudi tumbuh sebesar 54 persen dari tahun 2012 sampai 2013, dan para ahli mengatakan permintaan akan persenjataan di Arab Saudi akan terus bertambah (Staff, 2015, hal. 1).

Selama beberapa tahun Arab Saudi berada pada posisi teratas pengimpor senjata dari Amerika Serikat. Dari data penjualan senjata Amerika Serikat, selama tahun 2016 Arab Saudi berada pada peringkat pertama dengan nilai pembelian mencapai \$ 1.908 juta. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 13.000,00. Angka itu setara dengan Rp 24,8 triliun (Kamil, 2017, hal. 1).

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan pembelian senjata secara drastis oleh Arab Saudi, kesepakatan militer ini senilai \$ 110 miliar telah ditandatangani antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Ini merupakan salah satu "kesepakatan senjata tunggal terbesar" dalam sejarah Arab Saudi dan Amerika Serikat (bangsa, 2017, hal. 1). Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjungnya setelah berkuasa di Gedung Putih. kunjungan pertama Presiden Trump ke Riyadh telah memastikan transaksi penjualan senjata antara Amerika Serikat dan Arab Saudi tersebut. Menantu Trump, sekaligus penasihat senior Gedung Putih pun turut andil dalam negosiasi kesepakatan penjualan senjata tersebut. Ia dilaporkan telah menghubungi CEO kontraktor pertahanan, Lockheed Martin, dan memintanya untuk menurunkan harga sistem deteksi rudal yang dijual ke Arab Saudi.

Penjualan langsung senjata senilai 110 milyar dolar kepada Arab Saudi tersebut meliputi Tangki Abrams, kapal tempur, sistem pertahanan rudal, radar, dan teknologi keamanan siber dan komunikasi. Riyadh

diperkirakan akan menggunakan sebagian senjata tersebut dalam intervensi militernya di Yaman, tempat koalisi Saudi melakukan kejahatan-kejahatan perang. HAM sudah memperingatkan bahwa kesepakatan jual beli senjata itu akan membuat Amerika Serikat terlibat dalam intervensi militer yang dilakukan Saudi atas Yaman.

Arab Saudi juga melakukan kesepakatan bisnis senilai 55 milyar dolar dengan berbagai perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi dan kimia (Fadel, 2017).

Selain itu, Donald Trump dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi saat kunjungannya ke Amerika Serikat pada (Kamis, 22/3) menunjukkan gambar grafik besar kepada para wartawan yang berisikan bagan penjualan senjata militer kepada Arab Saudi. Trump menyinggung daftar belanja senjata oleh Arab Saudi dan jumlah lapangan kerja yang dibuka menyusul penjualan senjata tersebut dan meminta Arab Saudi membagi kekayaan negaranya dengan membeli senjata dari Amerika.

Arab Saudi sendiri berkeinginan melepaskan 5 persen sahamnya di perusahaan Aramco pada 2019. Langkah ini bisa membuat Aramco meraup dana segar sebesar 100 miliar dollar Amerika Serikat. Ini angka tertinggi yang pernah dibukukan pasar bursa dunia. Sebelumnya, Trump menyinggung kunjungannya ke Arab Saudi tahun lalu berhasil meraih ratusan miliar dolar dalam bentuk pembelian senjata dan investasi Arab Saudi di Amerika (Today, Kunjungan Putera Mahkota Saudi dan Penjualan Senjata AS, 2018).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa Arab Saudi meningkatkan pembelian senjata secara drastis ke Amerika Serikat pada tahun 2013-2017?”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Prespektif Realisme

Teori Realisme menganggap bahwa hubungan internasional bersifat anarki, konflik antar negara pasti akan terjadi sebagai manifestasi dari sifat dasar manusia yang tidak pernah puas. Kaum Realis memandang sifat dasar manusia pada dasarnya buruk, dan hal tersebut tidak dapat diubah. Konflik yang terjadi antar negara tersebut kemudian memaksa negara lemah untuk tunduk kepada negara yang lebih kuat. Konsep inilah yang kemudian mendorong munculnya istilah “keadilan adalah hak bagi mereka yang lebih kuat” (Jackson dan Sorensen, 2005, p. 88).

Realisme mulai muncul pasca Perang Dunia II, meski ide-ide dasarnya telah dimulai jauh sebelumnya, asumsi-asumsi dasar kaum realis menurut Jackson dan Sorensen yaitu: (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya bersifat konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya hanya bisa diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan politik dalam negeri. Secara umum, kaum realis percaya bahwa hubungan antar negara berada dalam sistem anarki internasional. Sistem anarki tersebut adalah suatu sistem tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara dan negara memegang kedaulatan mutlak. Realisme berpandangan bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan.

Selain itu, realisme juga lebih memilih jalan konflik atau peperangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini disebabkan karena realisme merupakan suatu pandangan pada politik internasional yang berfokus pada sifat *competitive* dan *conflictual*.

Dasar normatif realisme yaitu keamanan (*security*) dan kelangsungan hidup negara (*survival*) (Dunne & Schmidt, 2001, pp. 141-161), kedua hal tersebut merupakan esensi penting bagi terbentuknya suatu negara. Suatu negara akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara tersebut. *Survival* sebuah negara juga penting dalam menjaga kelangsungan hidup negara tersebut dalam memperoleh kepentingannya (*national interest*). Negara merupakan aktor utama dan memiliki peran paling penting dalam hubungan internasional. Kaum realis tidak mengakui aktor non negara. Fokus dari kaum realis yaitu *struggle for power*, hal ini dipertegas dengan tindakan dari setiap negara yang selalu memperhitungkan *cost and benefit* atas setiap tindakan yang dilakukannya.

Dalam perspektif realisme, moralitas mendapatkan tempat yang terbatas dalam politik internasional. Moralitas mendapatkan tempat yang terbatas karena moralitas dapat menghambat usaha suatu negara dalam memperoleh kekuatannya dari negara lain dan mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Perspektif realisme juga berpandangan bahwa politik internasional lebih penting dibandingkan politik dalam negeri. Sebab politik internasional memiliki kaitan erat dengan keutuhan kedaulatan suatu negara. Politik dalam negeri baru akan menjadi penting apabila politik tersebut dapat mempengaruhi sistem internasional (Dunne & Schmidt, 2001).

2. Konsep Balance Of Power

Bagi kaum realis, perdamaian dunia akan dapat diperoleh dengan dibentuknya *balance of power*. *Balance of power* atau perimbangan kekuatan merupakan sebuah konsep dimana setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya ataupun menyamakan kekuatannya dengan negara lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya negara yang memiliki kekuatan berlebih atau lebih dominan dibandingkan dengan negara lain. Kaum realis selalu merasa takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain, sehingga negara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya (Akbar, 2014).

Morgenthau juga menjelaskan bahwa inti dari pandangan realis terletak pada signifikansi kepentingan nasional (*national interest*), kekuasaan (*power*), pemerataan kekuasaan (*balance of power*), dan pengaturan kekuasaan dalam dunia anarki. *Balance of power* adalah salah satu teori hubungan internasional yang menekankan pada efektifitas kontrol terhadap kekuatan sebuah negara oleh kekuatan negara-negara lain. Kontrol yang terjadi berupa distribusi kekuatan negara pesaing ataupun aliansi. *Balance of power* memiliki asumsi dasar bahwa ketika sebuah negara yang dominan meningkatkan kekuatannya secara lebih agresif, maka negara-negara kecil yang merasa terancam akan merespon dengan beraliansi dengan negara besar untuk menjaga keamanan negara mereka dari ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh negara yang dominan. Sebagai contoh seperti saat Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara yang berkuasa saat itu terus menyeimbangkan kekuatan mereka dengan meningkatkan kapabilitas militer dan juga membentuk aliansi-aliansi dengan negara-negara lain. *Balance of power* dimaksudkan dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam struktur internasional.

Keteraturan itu dapat terwujud dikarenakan adanya security dilemma yang membuat negara-negara lebih terfokus pada peningkatan kekuatan militer yang mereka miliki sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang negara lain dan akhirnya yang terjadi adalah *balance of power*. Keteraturan dapat terwujud salah satunya tergantung pada efektifitas *balance of power* itu sendiri. *Balance of power* berfungsi efektif jika pertama, sekelompok negara dapat membentuk keseimbangan kekuatan dalam sebuah aliansi. Di dalam aliansi tersebut negara-negara pasti lebih merasa aman dan juga lebih tahu kekuatan masing-masing negara dalam aliansi tersebut. Dalam keadaan yang demikian, proses keseimbangan kekuatan dapat mendorong terciptanya dan terjaganya stabilitas hubungan antar negara yang beraliansi, sebagai contoh banyak dibuatnya kelompok pertahanan dunia. Kedua, dua negara yang berbeda dapat saling melakukan perimbangan kekuatan dengan cara menyesuaikan kekuatan militer masing-masing antara yang satu dengan yang lain.

Pemikiran Morgenthau bersumber pada pemikiran bahwa negara merupakan aktor yang sangat esensial perannya, dan bahwa para pengambil keputusan dalam negara bertindak dengan dan atas nama kepentingan nasional untuk memperoleh dan meningkatkan power yang dimilikinya. Morgenthau juga mengatakan bahwa politik dipandang sebagai usaha untuk memperjuangkan kekuasaan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997, p. 71).

3. Konsep Deterrence

Dalam keadaan dunia internasional yang anarki, maka untuk menciptakan perdamaian diperlukan suatu keadaan dimana setiap negara harus memiliki kekuatan yang setara (*balance of power*). Menurut paradigma ini, jika negara itu kuat maka ia cenderung

akan ‘menghabisi’ negara yang lemah. Disinilah kemudian letak penting teori *deterrence* demi mewujudkan perdamaian dalam asumsi paradigma realis.

Teori *deterrence* berkembang luas di kalangan ilmuwan hubungan internasional dan diterapkan dalam kebijakan-kebijakan militer terutama pada masa Perang Dingin (*Cold War*). Tak pelak, asumsi dan konsep-konsep dalam teori *deterrence* begitu mempengaruhi para pembuat kebijakan sehingga memicu terjadinya perlombaan persenjataan antara negara-negara yang berkonfrontasi secara ideologis (komunis vs kapitalis). Setiap kali suatu negara meningkatkan kapasitas militernya, maka negara lain yang berbeda ideologis akan merasa terancam karena tidak mempunyai kekuatan penangkal lagi sehingga iapun akan memperbesar pengeluaran negaranya untuk keperluan belanja militer. Demikian seterusnya hingga terciptalah lingkaran setan yang tak berkesudahan.

Pengaruh teori *deterrence* pasca Perang Dingin sekarang ini meskipun tidak sebesar masa lalu, namun dalam kaca mata berpikir militer masih dianggap merupakan strategi ampuh yang paling masuk akal. Dalam kenyataannya, meski berbagai pertemuan internasional digelar dan banyak konvensi telah dihasilkan seputar pembatasan penggunaan senjata tertentu (seperti ranjau darat, bom biologis, senjata pemusnah massal) dan perlucutan persenjataan (*disarmament*), namun pembangunan sistem rudal antar benua (*intercontinental missiles*) misalnya masih terus saja dilakukan.

Doktrin utama teori *deterrence* bergantung kepada kemampuan sebuah negara untuk melakukan ‘*second strike*’ meski ia telah mendapat serangan masif ‘*first strike*’ dari musuhnya. Asumsinya adalah bahwa musuh tersebut akan mencegah serangannya

(serangan dapat ditangkal) karena jika mereka menghancurkan kita, maka pada gilirannya nanti mereka pun akan hancur juga oleh kita. Teori *deterrence* seperti ini telah menjadi asumsi utama kebijakan strategis selama empat dekade Perang Dingin. Meski demikian, situasi sebenarnya yang dihasilkan dalam teori *deterrence* masih sangat *debatable*. Kesuksesan akan berjalannya asumsi-asumsi dalam teori *deterrence* diukur dengan tidak adanya sesuatu yang terjadi serta tercegahnya aksi militer dalam bentuk perang. Namun karena tidak adanya sesuatu yang terjadi itulah maka kita tidak akan bisa yakin sepenuhnya bahwa keadaan demikian tercipta karena berjalannya teori *deterrence* ataukah karena faktor lain yang mencegah terjadinya perang (Rourke, 1988).

Terdapat dua aspek yang menjadikan teori *deterrence* berjalan dengan baik, yakni kapabilitas dan kredibilitas. Kapabilitas berarti untuk mewujudkan *deterrence* yang efektif maka sebuah negara harus memiliki kapasitas untuk dapat merespon pasca serangan yang dilakukan pihak musuh kepadanya. Dalam hal ini isu yang mengemuka bukanlah pada seberapa banyak manusia yang bisa terbunuh oleh sebuah senjata, namun lebih kepada berapa banyak senjata musuh yang masih tersisa setelah mereka diserang. Jika kemudian sebuah negara meningkatkan jumlah persenjataan demi keamanan negaranya, maka hal ini akan diikuti oleh negara lain untuk juga menambah persenjataan mereka dengan alasan demi memastikan kemampuan mereka untuk dapat melakukan serangan balasan (*retalitory second strike*) manakala mereka diserang negara tersebut. Pada akhirnya, perilaku negara tadi akan menekan negara pertama untuk menambah persenjataan pula sehingga terciptalah perlombaan persenjataan (*the arms spiral*).

Adapun kredibilitas berarti keyakinan pihak musuh bahwa kita benar-benar akan menggunakan persenjataan yang kita miliki. Dengan demikian, persepsi adalah faktor kunci. Banyak kalangan berpendapat bahwa penghentian aktivitas pembuatan nuklir, pergerakan dan persebarannya selama Perang Dingin membuat Uni Soviet berpikir bahwa Barat tidak memiliki keinginan sama sekali untuk merespon jika terjadi serangan meskipun kapabilitasnya belum dihancurkan. Dalam teori *deterrence*, persepsi demikian bisa lebih berbahaya dibanding dengan situasi perlombaan persenjataan (Rourke, 1988).

Dua aspek tersebut diyakini telah membuat teori *deterrence* berjalan dengan baik dan menghindarkan terjadinya Perang Dunia di masa Perang Dingin. Ide dasarnya adalah masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk tetap memiliki senjata setelah diserang serta masing-masing pihak memiliki keinginan untuk merespon dan melakukan pembalasan setimpal sehingga pihak lawan akan tercegah untuk melakukan serangan terlebih dahulu. (Rourke, 1988)

Dalam Kasus pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi, peningkatan pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi merupakan hasil dari proses politik internasional Arab Saudi. Arab Saudi beranggapan bahwa dunia itu anarkis, oleh sebab itu Arab Saudi meningkatkan pembelian senjata kepada Amerika Serikat. Dalam hal ini Arab Saudi menganut paham *Balance of Power* guna menyetarakan kekuatan dengan Iran serta mendapatkan kekuatan penangkal (*Deterrence of Power*) terhadap militer Iran. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki kepentingan untuk menjaga wilayahnya dari kemungkinan serangan militer yang dilakukan oleh Iran.

D. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa alasan Arab Saudi melakukan peningkatan pembelian senjata dari Amerika Serikat adalah:

Mengimbangi kekuatan militer Iran dan Menghambat pengaruh Iran di negara-negara kawasan Timur Tengah.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis memperhatikan bahwa data kualitatif dapat dianalisis dalam berbagai format. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antara dua negara, yaitu Arab Saudi dan Amerika Serikat, dengan berpedoman pada rujukan data-data ilmiah atau data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dimana data-data tersebut diseleksi dan diolah dengan seksama menggunakan teknik analisis data. Data sekunder yang penulis dapatkan adalah melalui sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan kerja, tesis, dan berita online. Dengan sumber data sekunder tersebut diharapkan dapat membantu penulis untuk memaparkan lebih dalam mengenai motif pembelian senjata Amerika Serikat oleh Arab Saudi.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini menekankan pada penggunaan batasan waktu. Dalam batasan waktu yaitu 2013 yang mana pada tahun itu kerjasama antar Amerika dan Arab

Saudi tengah gencar-gencarnya serta awal mula peningkatan pembelian senjata oleh Arab Saudi hingga tahun 2017 yang merupakan tahun dimana Donald Trump melakukan ekspor senjata dalam jumlah yang sangat fantastis ke Arab Saudi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data rujukan di luar waktu tersebut jika dianggap masih relevan dengan topik penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB 1 Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang permasalahan dan permasalahan pokok dari topik pembahasan.

BAB II Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat. Dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat tentang gambaran umum hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat sejak tahun 1943 sampai tahun 2017.

BAB III Peningkatan pembelian senjata Arab Saudi ke Amerika Serikat. Dalam bab ini akan dibahas secara singkat peningkatan pembelian senjata Arab Saudi ke Amerika Serikat yang mencakup jumlah senjata, jenis senjata dan lain-lain.

BAB IV Alasan peningkatan pembelian senjata Arab Saudi ke Amerika Serikat. Dalam bab ini akan dibahas mengenai alasan Arab Saudi meningkatkan pembelian senjatanya ke Amerika Serikat yang meliputi beberapa faktor yaitu:

1. Peningkatan militer Iran
2. Usaha Arab Saudi dalam membendung pengaruh Iran terhadap negara-negara kawasan Timur Tengah

BAB V Kesimpulan. Dalam bab ini akan terdapat uraian kesimpulan dari pembahasan.